

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Investasi**

##### **2.1.1 Pengertian Investasi**

Istilah investasi berasal dari Bahasa latin, yaitu *investire* (memakai) sedangkan dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *investment*. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Fitzgerald mengartikan investasi adalah “aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal dengan di hasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang”. Murdihaning dan Salim Basamalah (2003:4) menjelaskan definisi investasi di kontrusksikan sebagai kegiatan untuk :

- 1) Penarikan sumber dana yang di gunakan untuk pembelian barang modal
- 2) Barang modal itu akan di hasilkan dengan produk baru

Berdasarkan PSAP Nomor 06 tahun 2016 tentang Standar Akuntansi Investasi Pemerintah berbasis akrual dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pengertian investasi menurut Tandililin (2010) adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa

datang. Definisi investasi menurut Nanga (2011) adalah tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada atau bisa juga disebut akumulasi modal. Selanjutnya pengertian investasi menurut Martalena dan Malinda (2011) adalah bentuk penundaan konsumsi di masa sekarang untuk memperoleh konsumsi di masa yang akan datang, dimana didalamnya terkandung unsur risiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut.

### **2.1.2 Bentuk Investasi**

Pemerintah melakukan investasi dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka panjang atau menggunakan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek demi keperluan manajemen kas. Terdapat berbagai jenis investasi yang dapat didokumentasikan dengan sertifikat atau dokumen serupa. Investasi tersebut meliputi pembelian surat hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi.

### **2.1.3 Klasifikasi Investasi**

Menurut PSAP Nomor 06 (Revisi tahun 2016), investasi pemerintah dibagi menjadi dua kategori utama investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan aset lancar yang dapat segera diperjualbelikan, ditujukan untuk manajemen kas, dan memiliki risiko rendah. Pembelian surat-surat berharga yang rentan terhadap fluktuasi harga pasar tidak termasuk dalam kategori investasi jangka pendek. Jenis investasi

tersebut meliputi pembelian surat berharga untuk mengendalikan badan usaha, menjaga hubungan kelembagaan, atau tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam jangka pendek. Investasi jangka pendek mencakup deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sementara itu, investasi jangka panjang dibagi menjadi permanen dan nonpermanen. Investasi permanen dimaksudkan untuk dipertahankan tanpa niat untuk dijual, sementara investasi nonpermanen dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau tidak dimaksudkan untuk dipertahankan secara berkelanjutan. Contoh investasi permanen adalah penyertaan modal pada perusahaan negara atau daerah, sementara investasi nonpermanen mencakup pembelian obligasi jangka panjang, penanaman modal dalam proyek pembangunan, dan dana yang disisihkan untuk pelayanan masyarakat. Penyertaan modal pemerintah bisa berupa saham atau kepemilikan modal non saham pada perusahaan. Investasi permanen lainnya termasuk obligasi jangka panjang, penanaman modal dalam proyek pembangunan, dan investasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi diatur dalam standar akuntansi tersendiri.

#### **2.1.4 Jenis Investasi**

Menurut Sadono (2004:108), investasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu investasi yang terdorong dan investasi otonom. Investasi yang terdorong terjadi sebagai hasil dari peningkatan permintaan, sedangkan investasi otonom dilakukan secara independen, tanpa bergantung pada

pertumbuhan permintaan yang efektif. Menurut Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia (2009:13.02), jenis-jenis investasi mencakup investasi lancar, investasi jangka panjang, investasi properti, dan investasi dagang.

- a. Investasi lancar dapat segera dicairkan dan dimiliki selama setahun atau kurang.
- b. investasi jangka panjang mencakup investasi lain selain investasi lancar.
- c. Investasi properti adalah investasi pada tanah atau bangunan yang tidak digunakan oleh perusahaan yang melakukan investasi.
- d. investasi dagang ditujukan untuk memudahkan atau mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan.

#### **2.1.5 Tujuan dan Manfaat Investasi**

Maksud umum dari investasi adalah meningkatkan kesejahteraan investor dalam hal finansial. Tendelilin (2010) menyatakan bahwa ada tiga motif utama yang mendorong investor untuk melakukan investasi, salah satunya adalah untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

- a. Mengurangi tekanan inflasi.
- b. Dorongan menghemat pajak.

Dalam melakukan investasi, investor dapat mengharapkan sejumlah keuntungan, namun perlu diingat bahwa aktivitas investasi juga melibatkan risiko tertentu. Menurut Mukherji et al. (2008), terdapat hubungan linier dan

searah antara risiko dan return yang diharapkan dari suatu investasi. Hal ini berarti semakin besar return yang diharapkan, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh investor (Fabozzi, 2000). Konsep mendasar mengenai return dan risiko dapat dijelaskan sebagai berikut: [Silakan isi dengan penjelasan lebih lanjut mengenai konsep tersebut :

a) Keuntungan (return)

Menurut Rupert (2004), return dari suatu aset adalah hasil atau pengembalian yang diperoleh dari investasi. Return merupakan salah satu faktor yang mendorong investor untuk melakukan investasi karena mencerminkan perubahan harga secara konkret. Dalam bidang manajemen investasi, penting untuk membedakan antara return yang diharapkan, yang merupakan tingkat return yang diprediksi oleh investor untuk masa mendatang, dan return aktual, yang merupakan tingkat return yang benar-benar terjadi.

b) Resiko (risk)

Secara keseluruhan, risiko adalah tingkat ketidakpastian mengenai kemungkinan terjadinya atau tidak terjadinya sesuatu dalam suatu periode waktu tertentu (Batuparan, 2000). Dari sudut pandang manfaatnya, investasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Noor, 2009):

- a. Investasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat umum, seperti investasi dalam pembangunan infrastruktur (seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pasar, dan sebagainya), konservasi alam,

pengelolaan limbah, teknologi, riset dan pengembangan, olahraga, pertahanan, keamanan, dan bidang lainnya yang menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan.

- b. Investasi yang memberikan manfaat bagi kelompok khusus masyarakat, seperti investasi dalam pembangunan sarana ibadah dan kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, bidang olahraga tertentu, infrastruktur yang spesifik, konservasi lingkungan di area tertentu, pengelolaan limbah di lingkungan tertentu, dan bidang lain yang menguntungkan masyarakat atau kelompok tertentu.
- c. Investasi yang memberikan manfaat secara pribadi atau bagi rumah tangga, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan aspirasi di masa depan. Jenis investasi ini mencakup investasi dalam properti pribadi atau keluarga, pendidikan, kegiatan keagamaan, usaha untuk mendapatkan penghasilan, dan bidang lain yang memberikan keuntungan bagi individu atau keluarga secara langsung.

## **2.2 Akuntansi Investasi**

### **2.2.1 Tujuan Kebijakan Akuntansi Investasi**

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

### **2.2.2 Ruang Lingkup**

1. Kebijakan Akuntansi ini wajib digunakan dalam pelaporan investasi Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum, yang mencakup pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Kebijakan ini juga berlaku untuk pengakuan pos aset, kewajiban, dan ekuitas berdasarkan basis akrual.
2. Kebijakan Akuntansi ini berlaku bagi entitas yang menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan keuangan konsolidasian, serta entitas akuntansi BUD dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan Akuntansi ini mengatur cara pengelolaan akuntansi investasi Pemerintah Daerah, termasuk investasi jangka pendek dan jangka panjang, yang mencakup proses pengakuan, klasifikasi, pengukuran, metode penilaian, serta penyajian informasi mengenai investasi dalam laporan keuangan.

## **2.3 Akuntansi Investasi Menurut PSAP Nomor 06 Tahun 2016 Dalam PP 71 Tahun 2010**

### **2.3.1 Pengakuan Investasi**

Berdasarkan PSAP No.06 (Revisi 2016), suatu transaksi pengeluaran uang atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah berpotensi mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau layanan potensial di masa depan dengan tingkat kepastian yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penilaian terhadap tingkat kepastian aliran manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau layanan potensial di masa mendatang berdasarkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal.
- b. Penilaian nilai perolehan atau nilai wajar investasi harus dapat diandalkan, yang sering kali didasarkan pada bukti transaksi yang menunjukkan biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, estimasi yang dapat dipercaya juga dapat digunakan.

### **2.3.2 Pengukuran investasi**

Untuk beberapa jenis investasi, adanya pasar yang aktif dapat menetapkan nilai pasar, dan dalam kasus tersebut, nilai pasar digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya dapat digunakan sebagai pengganti.

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga seperti saham dan obligasi jangka pendek dicatat dengan nilai sebanding dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga transaksi investasi itu sendiri, termasuk komisi perantara jual beli, layanan bank, dan biaya lain yang timbul selama proses perolehan. Jika surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya



digunakan, setara dengan harga pasar. Jika tidak ada nilai wajar yang dapat diidentifikasi, penilaian investasi didasarkan pada nilai wajar dari aset lain yang diberikan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non-saham, seperti deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

2. Pengukuran investasi jangka panjang.

1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen

dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi jangka panjang non permanen:

a) Investasi jangka panjang non permanent dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.

b) Investasi jangka panjang non permanen yang ditujukan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian, seperti dana talangan untuk memperkuat sektor perbankan, dinilai sesuai dengan nilai bersih yang dapat diperoleh.

c) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah, seperti proyek PIR, diukur dan dicatat dengan memperhitungkan biaya pembangunan, termasuk biaya perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan hingga penyelesaian proyek dan penyerahan kepihak ketiga. Jika investasi

jangka panjang diperoleh melalui pertukaran aset pemerintah daerah, nilai investasi diukur dan dicatat berdasarkan harga perolehannya atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak tersedia. Untuk harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama, nilai tersebut dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

### **2.3.3 Metode penilaian investasi**

Berdasarkan PSAP No.06 Tahun 2016, penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya.

Metode ini digunakan untuk kepemilikan kurang dari 20%. Dengan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas.

Metode ekuitas digunakan untuk kepemilikan saham antara 20% hingga 50%, kepemilikan kurang dari 20% dengan pengaruh yang signifikan, serta kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan menyesuaikannya dengan bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba, kecuali dividen dalam bentuk saham yang

diterima oleh pemerintah, akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Metode ini biasanya digunakan untuk kepemilikan yang akan dijual dalam waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali. Perhitungan nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya. Besarnya penyisihan untuk investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase yang ditetapkan untuk masing-masing kelompok.:

**Tabel. 2.1**  
**Presentase Penyisian Investasi**

<b>No</b>	<b>Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi</b>	<b>Persentase Penyisihan</b>
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	10 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	15 %
3	Jatuh tempok pada periode 3 s.d 4 Tahun	20 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

d) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanent menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam beberapa situasi, keputusan pemilihan metode penilaian investasi tidak hanya bergantung pada prosentase kepemilikan saham, tetapi lebih didasarkan pada tingkat pengaruh atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Tanda-tanda adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee meliputi:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris.
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi.
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*.
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat atau pertemuan dewan direksi.

Saham merupakan salah satu bentuk kepemilikan modal dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Investasi dalam saham semakin populer bagi berbagai jenis investor, baik individu maupun badan. Tujuan investasi saham pun bervariasi, mulai dari mencari keuntungan hingga mengendalikan kebijakan perusahaan.

Perusahaan yang memiliki kelebihan dana cenderung mencari cara untuk mendapatkan return dari dana tersebut. Salah satu alternatifnya adalah dengan menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk saham, daripada hanya menahan dana tersebut di dalam perusahaan.

Ketika sebuah perusahaan melakukan investasi dalam saham, ini akan tercermin dalam laporan keuangannya. Namun, PSAK telah mengatur pola pencatatan yang harus diikuti dalam laporan keuangan.

Secara umum, investasi saham dicatat menggunakan metode Biaya atau metode Ekuitas. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam tabel berikut ini. :

**Tabel 2.2**  
**Metode Penilaian Investasi**

epemilikan Saham	Metode Pencatatan
< 20 %	Metode Biaya
20% - 50 %	Metode ekuitas
> 50 %	Konsolidasi

Tabel tersebut memberikan gambaran umum tentang perbedaan dalam metode pencatatan investasi berdasarkan kepemilikan saham. Perbedaan utamanya terlihat pada fluktuasi saldo investasi. Detailnya dapat dilihat dalam tabel jurnal berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Penjurnalan dengan Metode Penilaian Investasi**

Keterangan	Metode Biaya	Metode Ekuitas
Penempatan Dana	Investasi pada saham (D) Bank (K)	Investasi pada saham (D) Bank (K)
Perusahaan penerbit saham mengambil laba	Tidak melakukan Jurnal	Investasi pada saham (D) Bagian laba entitas asosiasi (K)
Perusahaan penerbit saham mengalami rugi	Tidak melakukan jurnal	Bagian rugi entitas asosiasi (D) Investasi pada saham (K)
Pembagian deviden	Bank (D) Pendapatan Deviden (K)	Bank (D) Investasi pada saham (K)

#### 2.3.4 Akuntansi untuk Penurunan Nilai Investasi

Setiap investasi harus dievaluasi pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah investasi tersebut mengalami penurunan nilai itu dianggap tidak temporer, maka dasar biaya dari setiap sekuritas diturunkan

sampai ke dasar biaya yang baru. Jumlah penurunan itu diperhitungkan sebagai kerugian yang direalisasi dan karenanya dimasukkan dalam laba bersih. Untuk sekuritas hitung pengujian penurunan nilai ditunjukkan untuk apakah kemungkinan besar bahwa investor tidak akan bisa menagih seluruh jumlah yang terutang menurut persyaratan kontraktual. Untuk sekuritas ekuitas setiap kali nilai yang dapat direalisasi jumlahnya lebih rendah dari pada jumlah tercatat investasi, maka harus dipertimbangkan bahwa telah terjadi penurunan nilai.

### **2.3.5 Pengungkapan Investasi**

Menurut PSAP No.06 Tahun 2016, Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen.
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut.
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- f. Perubahan pos investasi.

### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Berikut adalah

beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan konteks yang hampir serupa.

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti, Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Alfinasi P Dewi & Siswanto (2018)	Penerapan Akuntansi Investasi Jangka Panjang Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016	Metode kualitatif.	<p>(1) Investasi yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman pada tahun 2016 termasuk dalam kategori pengeluaran pembiayaan, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP 06. Dengan demikian, investasi tersebut akan direkam dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemda Kabupaten Sleman tahun 2016.</p> <p>(2) Penyertaan modal pada PDAM Sleman juga diukur sesuai dengan biaya perolehannya. Investasi jangka panjang ini dilakukan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).</p> <p>(3) Pengukuran investasi jangka panjang, baik permanen maupun non-permanen, telah dilakukan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 dan Peraturan</p>

			Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014. Investasi permanen diukur berdasarkan biaya perolehannya, sementara investasi non-permanen diukur berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
Maya Angelica (2019)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah	Metode kualitatif.	Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linear sederhana bahwa penerapan SAP mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Ini terlihat dari koefisien regresi yang positif, dimana setiap kenaikan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar satu satuan maka akan memberikan pengaruh sebesar 1,406 dalam peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan daerah Kabupaten Lamandau.
Juwita Sari (2018)	Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan)	Metode kualitatif.	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan sudah efektif, kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan sudah baik (berkualitas) dan terdapat pengaruh



			efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
--	--	--	---

## 2.5 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian dalam penjelasan serta beberapa fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian *empiric* dengan judul “Analisis penerapan Akuntansi Investasi Jangka Panjang Pada Pemerintah Kota Kupang”. Penelitian ini berfokus pada upaya untuk mengetahui dan menilai kinerja investasi daerah pemerintah Kota Kupang dari segi laporan yang disesuaikan dengan PSAP Nomor 6. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar untuk menentukan kelayakan investasi pemerintah daerah Kota Kupang. Ruang lingkup penelitian ini dapat dilihat pada gambar kerangka berpikir dibawah ini :

**Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir**

